

# **Bombana Raih Penghargaan UHC, Komitmen Tingkatkan Layanan Kesehatan Dapat Apresiasi Nasional**

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Kategori Madya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC) K.H. Ma'ruf Amin, dan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dalam sebuah acara di Karakatau Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).

Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya nasional yang bertujuan mewujudkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam acara yang bertema "Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri", penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam mendaftarkan seluruh penduduk pada program tersebut. Dari 460 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Bombana berhasil masuk dalam 364 kabupaten yang mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

Kategori Madya yang diterima oleh Kabupaten Bombana menunjukkan pencapaian signifikan dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang merata terhadap jaminan kesehatan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah yang terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi target UHC yang sudah terealisasi di atas 98% dari total penduduk Indonesia, di mana lebih dari 275 juta jiwa telah terdaftar dalam Program JKN-KIS. Namun, beliau juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program ini, terutama di daerah terpencil.

“Saya berharap permasalahan dalam penyediaan fasilitas kesehatan tidak akan menghambat komitmen kita untuk memberikan layanan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terpencil,” ujar Ma’ruf Amin.



Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto saat menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC)

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy juga menyampaikan apresiasinya terhadap capaian UHC di Indonesia, yang mencapai 98%. Prestasi ini dinilai sebagai langkah luar biasa dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Ia berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus memperluas akses layanan kesehatan.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, dalam pernyataannya mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini. “Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga milik seluruh masyarakat Kabupaten Bombana yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program ini. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Edy Suharmanto menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus berupaya memperbaiki dan memperluas jangkauan layanan kesehatan, termasuk di wilayah pedesaan yang seringkali menghadapi kendala akses. “Kami akan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan yang lebih baik dan merata,” tambahnya.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Bombana tidak hanya berhasil mencapai target nasional UHC, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang berkomitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor kesehatan. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk lebih aktif dalam melaksanakan program kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberhasilan dalam mencapai UHC ini juga menjadi landasan penting bagi Kabupaten Bombana untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor kesehatan, diharapkan Bombana dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Dengan penghargaan yang telah diraih, Kabupaten Bombana menunjukkan kemajuan signifikan di sektor kesehatan dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam pelaksanaan program JKN yang inklusif dan berkelanjutan.

---

## **Pemkab Bombana Terima Duplikat Bendera Pusaka Jelang HUT RI ke-79**

**Bombana, sultranet.com** - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima duplikat Bendera Pusaka. Duplikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. Kh.H Yudian Wahyudi, M.A.,

Ph.D, kepada Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (7/8/2024). Didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dr. H. Sunandar, M.Kes., dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Bombana, penyerahan ini menandai momen penting menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Selain Bombana, kegiatan ini dihadiri pula oleh para bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Indonesia yang turut menerima duplikat Bendera Pusaka.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini menjadi simbol penting bagi masyarakat Bombana dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kehadiran kami di sini adalah bukti nyata komitmen Kabupaten Bombana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat Bombana akan turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-79," ujar Edy.

Ia juga menambahkan bahwa penerimaan duplikat ini bukan hanya simbolis, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat akan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. "Dengan menerima duplikat bendera pusaka ini, kami berkomitmen untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan terus memperkuat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.

Perayaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Bombana akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperingati sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Bendera pusaka yang telah diterima akan menjadi simbol semangat dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Bombana dalam menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan berbagai kegiatan positif yang mencerminkan nilai kebersamaan dan kemajuan.

Momen penerimaan duplikat bendera ini terasa istimewa karena terjadi kembali setelah 55 tahun, sejak pertama kali Presiden Soeharto menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada para gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia pada 5 Agustus 1969. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak penting yang mengingatkan kembali pada tanggung jawab setiap daerah untuk terus menjaga keutuhan NKRI.

Prof. Drs. Kh.H Yudian Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerimaan duplikat bendera ini tidak hanya sebagai seremonial, tetapi merupakan simbol kebangkitan dan semangat nasionalisme. “Bendera Pusaka ini adalah pengingat agar kita semua terus menjaga semangat juang, persatuan, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, dr. H. Sunandar, M.Kes., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, menambahkan bahwa penyerahan duplikat Bendera Pusaka ini akan menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat Bombana untuk berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. “Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat persatuan akan semakin kuat dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.



Pemkab Bombana saat menerima duplikat Bendera Pusaka

Dengan penerimaan duplikat Bendera Pusaka ini, Kabupaten Bombana siap menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-79. Kegiatan-kegiatan ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah hingga tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, perayaan HUT RI kali ini akan menjadi momen yang tidak hanya dirayakan dengan sukacita, tetapi juga diisi dengan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan. Semangat yang terkandung dalam Bendera Pusaka ini akan menjadi pemersatu bagi masyarakat Bombana dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Kabupaten Bombana terus berkomitmen dalam memperjuangkan dan menjaga persatuan, serta melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara.

---

## Jelang Pilkada, Polres Bombana Intens Sosialisasi

**Bombana, SultraNET.com** - Menjelang pelaksanaan Pilkada pada November 2024 mendatang, Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bombana intens memberikan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga hingga pilkada usai.

Kasat Binmas Polres Bombana, Iptu Ishak Musrif, menyampaikan hal ini setelah mengunjungi kediaman Direktur LKPD di Kelurahan Kasipute, Kabupaten Bombana, Selasa (6/8/2024).

Iptu Ishak Musrif menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada 2024.

Ia melakukan pendekatan dengan menyambangi tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, serta organisasi kepemudaan di wilayah Bombana.

“Dalam setiap kunjungan, kami menyampaikan pesan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung

Polri dalam menjaga Kamtibmas menjelang Pilkada 2024 serta menolak segala bentuk hoax dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan,” ujar Iptu Ishak Musrif.

Mantan Kasat Samapta Polres Konsel ini juga menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap berita-berita tidak benar yang mungkin muncul selama kampanye.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang mungkin muncul selama kampanye,” tegasnya.

Ia menambahkan, pada November 2024 mendatang, Bombana akan menggelar Pilkada 2024. Tentunya akan ada perbedaan pandangan dan pilihan di antara masyarakat.

“Kita harus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Hindari menyebarkan atau percaya pada berita yang belum tentu kebenarannya, terutama yang dapat memicu konflik di masyarakat,” jelasnya.

Kasat Binmas Polres Bombana ini mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari warga, tokoh masyarakat, pemuda, hingga seluruh lapisan masyarakat, untuk menjaga keamanan, terutama dalam menghadapi momen politik ini.

“Jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan di antara warga. Baik sebelum, saat, maupun setelah Pilkada, tetap jaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan demi suksesnya Pilkada 2024,” tutupnya (\*\*)

---

## **Bombana Raih Penghargaan Nasional Atas Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2024**

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan sekaligus.

Bombana berhasil menempati Peringkat 1 sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Peringkat 3 dalam penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, dan diterima oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., di Kantor KPPN Kendari pada Selasa (6/8/2024).

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran negara secara efektif dan tepat sasaran. DAK Fisik dan Dana Desa merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang solid dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, terutama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KPPN Kendari yang telah mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Bombana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pengelolaan dana ini, baik dari jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat yang berperan aktif dalam memanfaatkannya.”

Edy menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga menjadi tantangan dan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Ia berharap capaian ini dapat mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, khususnya di Bombana.

Penghargaan ini juga menjadi refleksi atas komitmen daerah dalam mendukung program nasional. Menurut Agung Mulyono, Kepala KPPN Kendari, keberhasilan Bombana dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak terlepas dari ketepatan waktu dan transparansi dalam penggunaan anggaran. “Bombana berhasil membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang paling responsif dan akuntabel dalam mengelola dana dari pusat. Kami berharap prestasi ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

DAK Fisik dan Dana Desa sendiri merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah-daerah, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai berhasil dalam mengoptimalkan penggunaan dana ini, yang tercermin dari kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat.



Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto saat menerima penghargaan

Keberhasilan dalam penyaluran Dana Desa juga mencerminkan dedikasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memberdayakan desa-desa di wilayahnya. Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, dan pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal serta memperkuat ketahanan masyarakat di level paling bawah.

Tidak hanya menjadi ajang penghargaan, acara ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk berbagi pengalaman sukses dalam pengelolaan anggaran. Edy Suharmanto menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dari keberhasilan tersebut. "Kami selalu berusaha menjalankan setiap proses dengan terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat dan perencanaan yang matang juga menjadi bagian

penting dari strategi kami,” jelasnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan anggaran yang lebih baik lagi. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh elemen pemerintahan di Bombana untuk bekerja lebih keras demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan pencapaian ini, Bombana sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien, serta membuktikan diri sebagai daerah yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

---

# LKPD Laporkan Adimarno Terkait Pernyataan Kota Mekah Kota Menyesatkan

**Bombana, SultraNET** - Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) resmi melaporkan Adimarno ke Polres Bombana terkait pernyataannya yang kontroversial di media sosial. Selasa (6/8/2024)

Langkah ini diambil setelah Adimarno tidak mengindahkan permintaan LKPD untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf dalam waktu 2 x 24 jam.

Pada Jumat, 2 Agustus 2024, Adimarno mengunggah pernyataan di akun Facebook-nya, Adimarno Suku Tokotua, yang menyebut Kota Mekah lebih tepat disebut sebagai “kota yang menyesatkan” dan bukan “kota suci”.

Pernyataan ini menuai reaksi keras dari masyarakat, dengan postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 86 kali dan mendapat 450 komentar netizen yang mayoritas mengecamnya.

Direktur LKPD, Muh. Arham, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan

kesempatan kepada Adimarno untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada publik, khususnya umat Muslim yang merasa tersakiti. Namun, Adimarno tidak menanggapi permintaan tersebut hingga batas waktu yang diberikan.

“Setelah kami memberikan waktu 2 x 24 jam kepada Adimarno untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya, namun tidak diindahkan, kami akhirnya memutuskan untuk melaporkannya ke Polres Bombana,” ujar Arham.

Ia menyebut pernyataan Adimarno sangat menyakitkan umat Muslim dan tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, ia meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Arham menambahkan bahwa pernyataan Adimarno yang menyebut Mekah sebagai kota yang menyesatkan dan menyoroti berbagai kejahatan di kota suci tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Muslim.

“Mekah adalah kota suci bagi Islam, dan pernyataan Adimarno di media sosial sangat melukai perasaan umat, karena tidak didasari pengetahuan yang memadai,” tegasnya.

Selain melaporkan Adimarno ke polisi, LKPD juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media.

“Hindarilah pernyataan yang bisa berpotensi merusak hubungan kemasyarakatan dan menyakiti publik karena bisa berujung pada pidana. Mari bersosial-media dengan baik dan mengutamakan edukasi,” kata Arham.

Kasus ini kini sedang ditangani oleh Polres Bombana, dan Adimarno diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait pernyataannya.

Sementara itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang.

Pernyataan kontroversial Adimarno telah memicu diskusi hangat di kalangan netizen dan menimbulkan berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang. Namun, mayoritas netizen mengecam keras pernyataan tersebut dan meminta agar Adimarno segera menarik ucapannya serta meminta maaf. (IS)

---

# 4 Caleg Terpilih di Muna Belum Sampaikan LHKPN

MUNA, SultraNET. - Sebanyak 30 Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Muna terpilih hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak lama lagi bakal dilantik. Namun, dari 30 Caleg terpilih tersebut, masih tersisa empat orang yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ketua KPU Kabupaten Muna, LM Askar Adi Jaya, mengatakan bahwa penyampaian LHKPN diatur dalam Peraturan KPU No 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

“Dari empat yang belum menyampaikan, seluruhnya merupakan Caleg yang baru terpilih hasil Pemilu 2024,” kata Askar saat memberikan sambutan pada kegiatan kelas Pemilu di salah satu hotel di Kota Raha, Senin (5/8/2024).

Askar menjelaskan bahwa caleg terpilih wajib menyampaikan LHKPN 21 hari sebelum masa pelantikan pada 16 Oktober 2024.

“LHKPN penting karena jika tak disampaikan, pihak KPU tak akan memasukkan sebagai Caleg yang akan dilantik nantinya,” jelasnya.

Ia juga menghimbau dan mengingatkan caleg terpilih agar segera melakukan pelaporan. Partai politik juga diminta untuk mengingatkan caleg terpilihnya agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.

Pelantikan 30 Caleg DPRD Kabupaten Muna akan menjadi momen penting dalam pemerintahan daerah. Namun, tanpa pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan, pelantikan ini bisa tertunda bagi empat caleg yang belum menyampaikan LHKPN mereka.

Pewarta: Borju

---

# Postingan Akun Chris John di FB Adalah Fitnah untuk Rajiun Tumada

**Muna, SultraNET.com** - Tim Media Center Rajiun Tumada dengan tegas memastikan pernyataan yang dibuat oleh akun Facebook (FB) Cris John, yang menyudutkan Bakal Calon Bupati Muna 2024-2029 Rajiun Tumada adalah fitnah yang kejam.

Dalam postingannya itu Cris John mengklaim pemilik Hotel Rosida Raha Hj. Niar sebagai salah satu donatur Rajiun untuk Pilkada Muna 2020 lalu dan menyumbangkan sekitar 20.000 suara yang saat ini telah mengalihkan dukungannya ke bakal calon lain.

La Eti, anggota Tim Media Center Rajiun, menegaskan bahwa pernyataan terkait Hj. Niar tersebut adalah hoax yang tidak berdasar, yang diduga dibuat karena sakit hati dan untuk mencari sensasi.

“Postingan dari akun akun seperti ini tujuannya untuk memecahkan belah dan menyebar fitnah,” ucap La Eti, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, La Eti menjelaskan terkait Hj. Niar yang disebut dalam postingan tersebut ia mengaku perlu meluruskan informasinya agar tidak menyudutkan pihak Rajiun Tumada.

Ia menyebut bahwa ipar dari Hj. Niar, Ali Badin, tidak terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu. Jika benar Hj. Niar menyumbangkan 20.000 suara pada Pilkada 2020 untuk Rajiun, maka seharusnya iparnya terpilih dengan suara yang fantastis, tetapi faktanya Ali Badin hanya memperoleh 1.657 suara.

“Dia juga mengatakan bahwa Rajiun menghalang-halangi Ali Badin di Pileg 2024 kemarin. Ini kan lucu, kok ada kata menghalangi. Masa tidak terpilih lalu yang disalahkan Pak Rajiun? Ini kan aneh,” tegas La Eti

Sementara itu, Sofyan Ombi, moderator sekaligus tim sukses Ali Badin, mengatakan bahwa dalam perjalanan Ali Badin di Pileg 2024 lalu, tidak ada indikasi bahwa Rajiun menyarankan untuk tidak memilih Ali Badin.

Ia memastikan bahwa setiap bertemu Rajiun Tumada, tidak pernah mendengar ia menyampaikan untuk tidak memilih Ali Badin, bahkan Rajiun menyampaikan untuk bersaing dengan strategi masing-masing calon yang ada.

Bahkan dalam setiap rapat Tim Rajiun, Ali Badin selalu hadir dibandingkan dengan rivalnya di partai

“Informasi di postingan itu merupakan narasi yang menyesatkan,” pungkasnya.

Diketahui, akun bernama Cris John menyampaikan di media sosial FB bahwa Hj. Niar, pemilik Hotel Rosida, pada Pilkada 2020 menjadi donatur dan menyumbangkan 20.000 suara untuk Rajiun, serta mengeluarkan uang dalam jumlah besar.

Namun, saat ini Hj. Niar beralih mendukung PLT Bupati Muna periode 2021-2026, H. Badrun M. Si, serta Ali Badin yang memperoleh 1.567 suara pada Pileg 2024.

Akun tersebut juga menuduh bahwa Rajiun bekerja keras untuk menghambat Ali Badin sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muna, yang konon diajak Rajiun untuk bertarung di Pileg 2024.

Hingga berita ini dirilis pihak Hj. Niar belum terkonfirmasi.

**Pewarta : Borju**

---

**Bombana Salurkan Bantuan**

# Pangan Cadangan Beras Pemerintah

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) resmi meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Bombana Tahap III Tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dan berlangsung di pelataran Kantor Bupati Bombana pada Senin (5/8/2024). Penyaluran ini dilakukan bekerja sama dengan Perum BULOG Bombana dan PT. Jasa Prima Logistik BULOG Sulawesi Tenggara.

Dalam acara tersebut, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan bahwa bantuan pangan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, serta upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan, dan menjaga stabilitas harga. "Melalui penyaluran ini, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para penerima bantuan. Meskipun nilai bantuan tidak terlalu besar, jika dimanfaatkan secara tepat, akan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat," ungkap Edy Suharmanto.

Pada tahap ketiga penyaluran bantuan pangan ini, sebanyak 12.948 Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan menerima 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Untuk hari ini, rencana penyaluran beras berjumlah 18,83 ton kepada 1.883 PBP yang berada di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, dan Rarowatu Utara.

Acara launching ini juga disertai dengan pelepasan mobil angkutan beras secara simbolis. Pj. Bupati Edy Suharmanto berharap agar distribusi bantuan pangan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi penerima. "Dengan launching ini, kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya pemulihan ekonomi lokal," jelasnya.

Bantuan pangan beras ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Program ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama di masa pemulihan

ekonomi pasca-pandemi.



Pj. Bupati Bombana saat melaunching penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Forkopimda Kabupaten Bombana, pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para stakeholder lainnya. Kehadiran mereka menegaskan dukungan terhadap program bantuan pangan yang digulirkan oleh pemerintah.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan dan memastikan ketersediaan bahan pokok, penyaluran bantuan pangan cadangan beras ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terdampak.

Dalam rangka mendukung program ini, pemerintah Kabupaten Bombana juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, agar program ini tepat sasaran dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Dengan demikian, penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bombana, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

---

# Lembaga Pribumi Desak Polres Bombana Atensi Kasus Dugaan Penganiayaan Oleh Oknum Kades Kalaero

**Bombana, SultraNET.com** - Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat, Unggul dan Mandiri (LSM-Pribumi) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Polres Bombana untuk mengatensi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya kepada warganya.

Ketua Umum Lembaga Pribumi Ansar Achmad mengatakan apa yang dilakukan Kepala Desa Kalaero, S, terhadap seorang warganya berinisial FIB (22) yang terjadi pada Jumat, 19 Juli 2023 di Kantor Desa Kalaero, merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin apalagi terhadap warganya.

“Apa yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut sangat tidak mencerminkan seorang pemimpin yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakatnya dengan baik,” ujar Ansar Achmad, Minggu (4/8/2024).

Dugaan penganiayaan ini berawal dari komentar FIB di Facebook yang mengkritik pelayanan publik di Desa Kalaero. FIB dipanggil oleh Kepala Desa S ke kantor desa untuk dimintai klarifikasi. Namun, sesampainya di sana, FIB

mengaku mengalami tindak kekerasan dan perusakan handphone oleh S.

“HP saya dibanting dihancurkan, dan saya ditendang di perut. Anak saya yang melihat kejadian itu berteriak histeris ketakutan,” kata FIB.

Kasus ini telah dilaporkan keluarga korban ke Polsek Lantari Jaya dan kemudian dilimpahkan ke Polres Bombana.

Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan kasus ini dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelasnya.

Ansar Achmad berharap, pihak kepolisian dapat menangani kasus ini dengan objektif dan tanpa memandang latar belakang pelaku.

“Kami berharap keadilan bisa ditegakkan tanpa memandang siapa pelakunya,” tegasnya.

Terduga pelaku, yang diketahui sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kalaero, adalah seorang purnawirawan polisi berpangkat Kompol di Polres Bombana.

“Selain itu lembaga perlindungan anak dan perempuan juga harus turun mendampingi korban dan anaknya yang menyaksikannya saat kejadian, kita takutnya ada dampak psikis terhadap anak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kalaero belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini. Kasus ini tetap dalam pemantauan Lembaga Pribumi dan masyarakat setempat yang berharap ada kejelasan dan keadilan bagi korban. (IS)

---

## **Oknum Kepala Desa di Bombana**

# Aniaya Warganya Dipicu Komentar Facebook

Bombana, SultraNET.com - Seorang pemimpin idealnya berfikir dan bertindak serta berjiwa besar dalam menyelesaikan suatu persoalan, terlebih adanya kritik dan saran dalam menjalankan amanah serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Lain halnya dilakukan oknum Kepala Desa Kalaero berinisial S, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga melakukan penganiayaan dan perusakan handphone (Hp) milik warga sendiri pada Jumat, 19 Juli 2023 lalu sekira pukul 08:30 WITA bertempat di Kantor Desa Kalaero.

Dugaan penganiayaan yang dialami warga berinisial FIB (22) tersebut dipicu adanya komentar korban di status Facebook salah satu warga yang mengeluhkan pelayanan publik di pemerintahan desa kalaero terkesan berbelit-belit.

Menanggapi status facebook korban kemudian menuliskan komentar yang isinya meminta agar pembuat status bersabar karena ibu mertuanya juga pernah mengalami hal serupa.

“Sabar ko Wehh (tag nama akun pembuat status) nda sendiri mu bgt bahkan mamer ku jg di kasi bgt disuruh pulang ambil kartu anu,, giliran sdh plng ambil,, kmbali mi nda dikasikan, Alhamdulillah nah tanpa surat itu ,, cair jhi nda pakai embel2,, malah di maklumi dgn pengurus anunya,” Isi komentar korban di akun Facebook.

Atas komentar FIB diduga menjadi pemicu oknum kepala desa S memanggil korban ke kantor desa untuk dimintai klarifikasi namun setibanya terjadilah dugaan tindak penganiayaan dan perusakan hp korban tersebut.

Dikonfirmasi awak media ini, Korban FIB mengaku telah mengalami tindak kekerasan dari Kepala desa Kalaero saat dirinya dipanggil terkait komentarnya di Facebook.

“HP saya dibanting dihancurkan, dan saya ditendang diperut dan itu ada anak

saya yang berteriak histeris ketakutan melihat kejadian itu di kantor desa kalaero disaksikan sebagian besar aparat desa dan keluargaku,” ujar FIB, Kamis (1/8/2024)

Kendati demikian ia mengaku sempat merekam suara di handphone miliknya yang lain yang isinya suara sejak ia datang ke kantor desa hingga ia kembali kerumahnya setelah tindakan dugaan penganiayaan terjadi.

“Sempat saya rekam semua pak sejak awal saya datang sampai saya pulang di kantor desa. Saya rekam unuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Sebab kepala desa ini agak tempramen untuk mengantisipasi itu,” bebernya.

Adanya penganiayaan dan kerusakan, keluarga korban melaporkan di Polsek Lantari Jaya dan telah dilimpahkan ke Polres Bombana. FIB berharap dan meminta kepada pihak penegak hukum objektif tanpa memandang latar belakang pelaku.

“Saya hanya berharap keadilan saja pak, tanpa memandang latar belakang pelaku. Pelaku ini sebelum menjadi kepala desa kalaero, merupakan seorang purnawiran berpangkat Kompol di Polres Bombana, belum lama ini terpilih menjadi kepala desa periode pertama,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry, mengatakan, pihak Polres Bombana baru menerima pelimpahan dari Polsek Lantari Jaya dan melakukan penyelidikan dan penyidikan proses lebih lanjut.

“Pelimpahannya baru-baru ini Polres Bombana terima pak, dan sudah dilakukan gelar perkara di Polres, selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” Jelas IPTU Yudha Febry.

Menurut Yudha Febry proses hukum akan terus berlanjut, sesuai dengan mekanisme prosedural hukum yang berlaku. Namun, ketika pihak pelaku dan korban mempunyai itikad dengan menempuh jalur kekeluargaan berdasarkan kesepakatan, tentunya kami hormati.

“Tentunya bisa di mediasi bang, asal kedua belah pihak mau dan ada pemulihan hak terhadap korban, karena kami tidak bisa intervensi terkait dengan hal itu,” Tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kalaero, S belum memberikan keterangan kendati telah dihubungi awak media. (IS)